



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

10 – 11 Mei 2023



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

11 / 05 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Rabu, 10 Mei 2023	+
	MEDIA	https://www.unpad.ac.id/2023/05/kemenkeu-setujui-fasilitas-pdf-untuk-proyek-kpbu-rs-unpad/	
	JUDUL	Kemenkeu Setujui Fasilitas PDF untuk Proyek KPBU RS Unpad	
	NARASUMBER	-	
	RESUME	Universitas Padjadjaran berhasil mendapatkan persetujuan Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan RI untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Unpad atau RS Unpad skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ini merupakan PDF pertama yang diberikan Kemenkeu kepada PTN Badan Hukum. fasilitas PDF ini sangat penting untuk proyek KPBU, khususnya untuk mendapatkan pendampingan penyiapan proyek. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) memerlukan pendampingan dari beberapa pihak, seperti PT. SMI dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dalam hal ini, PIJPK diberikan langsung kepada Rektor PTN Badan Hukum bersangkutan.	
2	TANGGAL	Rabu, 10 Mei 2023	+
	MEDIA	https://pontianak.tribunnews.com/2023/05/10/rencana-pembangunan-jembatan-garuda-terus-berlanjut-masih-tahap-penggodokan-dan-gunakan-sistem-kpbu	
	JUDUL	Rencana Pembangunan Jembatan Garuda Terus Berlanjut, Masih Tahap Penggodokan dan Gunakan Sistem KPBU	
	NARASUMBER	Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

11 / 05 / 2023

| Analisis Pemberitaan Media Online

RESUME	<p>Progres pembangunan <u>Jembatan Garuda</u> tengah melengkapi data, baik secara administrasi maupun teknis seraya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, <u>pembangunan Jembatan Garuda</u> akan berbentuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurut Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono untuk membangun jembatan tersebut memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, <u>pembangunannya</u> akan dibiayai oleh investor dengan sistem <u>KPBU</u>. Rencananya <u>Jembatan Garuda</u> ini menggunakan sistem tol berbayar. Terkait tarif, pihaknya nanti akan mengkaji lebih matang berdasarkan kemampuan masyarakat.</p>
---------------	---



10 / 05 / 2023

Sumber: unpad.ac.id

Kemenkeu Setujui Fasilitas PDF untuk Proyek KPBU RS Unpad

Author: Arief Maulana

[Kanal Media Unpad] Universitas Padjadjaran berhasil mendapatkan persetujuan Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan RI untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Unpad atau RS Unpad skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ini merupakan PDF pertama yang diberikan Kemenkeu kepada PTN Badan Hukum.

Tim KPBU Unpad Dr. Prita Amalia, S.H., M.H., mengatakan, PDF merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk penyiapan proyek KPBU. Dasar hukum PDF telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

“Persetujuan ini diberikan karena Unpad mengajukan dukungan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU, dan pengajuannya dinilai sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK 180/ PMK. 08/2020,” kata Prita saat dihubungi Kanal Media Unpad.

Prita menjelaskan, fasilitas PDF ini sangat penting untuk proyek KPBU, khususnya untuk mendapatkan pendampingan penyiapan proyek. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) memerlukan pendampingan dari beberapa pihak, seperti PT. SMI dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dalam hal ini, PIJPK diberikan

langsung kepada Rektor PTN Badan Hukum bersangkutan.

Bagi Unpad, lanjut Prita, PDF ini penting untuk memastikan bahwa ikhtiar dalam penyediaan infrastruktur rumah sakit bisa berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku serta mendapatkan dukungan optimal dari pemangku kepentingan.

Menjadi proyek infrastruktur perguruan tinggi yang pertama dengan skema KPBU, Prita mengatakan, sampai saat ini belum ada proyek rumah sakit KPBU yang berhasil. Karena itu, proyek pembangunan RS Unpad menjadi proyek perdana dengan skema KPBU, khususnya untuk infrastruktur perguruan tinggi dan kesehatan.

Dosen Fakultas Hukum Unpad yang juga Sekretaris Jenderal UNIID tersebut menjelaskan, dalam pengajuan PDF, Unpad berupa maksimal untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti studi pendahuluan, konsultasi publik, hingga studi banding praktik negara pembangunan infrastruktur rumah sakit dengan skema KPBU. Selanjutnya, disampaikan surat permohonan fasilitas PDF kepada Menteri Keuangan RI.

“Setelah memenuhi dan menjalani proses yang dipersyaratkan maka alhamdulillah pada awal Mei surat persetujuan fasilitas PDF untuk RSPTN Unpad diterbitkan. PDF diajukan langsung oleh Rektor Unpad



10 / 05 / 2023

Sumber: unpad.ac.id

sebagai PJPK dengan sebelumnya menerima pelimpahan wewenang dari Mendikburistek kepada Rektor Unpad sebagai PJPK untuk Proyek RS Unpad.” paparnya.

Usai mendapatkan persetujuan, Rektor Unpad Prof. Rina Indiatuti melakukan pertemuan dengan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu RI Brahmantio Isdijoso, Sabtu (6/5/2023). Pertemuan tersebut mendiskusikan beragam hal strategis untuk dapat mengakselerasi proses penyiapan proyek dan transaksi proyek KPBU RS Unpad.

Selain itu, kata Prita, diharapkan seluruh pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk mengakselerasi dan juga mendukung inovasi yang diperlukan guna melancarkan proses KPBU Unpad.

“Tentunya dengan PTN BH ini, perlu ada berbagai inovasi kebijakan, struktur KPBU yang dikaji sehingga dapat mendukung proyek KPBU PTN BH berjalan dengan lancar dan benar2 dapat dijadikan pilot project,” ujarnya.

Sesuai dengan tujuan bahwa PDF diberikan kepada PJPK untuk penyediaan fasilitas pendampingan penyiapan proyek dan transaksi proyek KPBU, Unpad selanjutnya bersama pendamping PT. SMI akan mempersiapkan tahapan selanjutnya untuk proyek KPBU, di antaranya menyusun kajian prastudi kelayakan sampai dengan terlaksanakannya transaksi, termasuk financial close.

Prita mengatakan, KPBU dapat dijadikan alternatif pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur, khususnya di PTN Badan Hukum.

“Dengan karakteristik yang dimiliki oleh PTN BH harapannya dapat bekerja sama dengan badan usaha khususnya untuk penyediaan infrastruktur. Unpad mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk KPBU RSPTN ini, semoga selanjutnya juga dapat menemukan pola-pola khusus sebagai PTN BH yang dapat diterapkan oleh PTN BH lainnya,” pungkasnya.*

<https://www.unpad.ac.id/2023/05/kemenkeu-setujui-fasilitas-pdf-untuk-proyek-kpbu-rs-unpad/>



10 / 05 / 2023

Sumber: tribunnews.com

Rencana Pembangunan Jembatan Garuda Terus Berlanjut, Masih Tahap Penggodokan dan Gunakan Sistem KPBU

Penulis: Muhammad Firdaus

Editor: Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memimpin rapat Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Jembatan Garuda di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Rabu 10 Mei 2023.

Ia mengungkapkan rencana pembangunan Jembatan Garuda yang akan menghubungkan Jalan Bardanadi - Siantan masih terus berlanjut

Progres pembangunan Jembatan Garuda tengah melengkapi data, baik secara administrasi maupun teknis seraya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Nantinya, pembangunan Jembatan Garuda akan berbentuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Sebab proses pembangunan ini harus melalui mekanisme, persetujuan Menteri PUPR, tim yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan lainnya," ujarnya.

Edi menambahkan, melalui FGD yang digelar ini, semua pihak terkait turut membahas masalah teknis rencana pembangunan Jembatan Garuda, baik itu dampak, manfaat, regulasi dan berbagai hal untuk mempersiapkan pembangunan jembatan dengan desain mewah ini.

"Apabila sudah mendapat lampu hijau, kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya seperti penyusunan draft, kaitan kontribusi yang diperoleh Pemerintah Kota Pontianak dan lain sebagainya," ungkapnya.

Menurutnya, untuk membangun jembatan tersebut memang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Oleh sebab itu, pembangunannya akan dibiayai oleh investor dengan sistem KPBU.

Rencananya Jembatan Garuda ini menggunakan sistem tol berbayar. Terkait tarif, pihaknya nanti akan mengkaji lebih matang berdasarkan kemampuan masyarakat.

"Sama halnya dengan ferry penyeberangan yang digunakan masyarakat saat ini untuk menyeberangi sungai dari Pontianak Kota ke Pontianak Utara atau sebaliknya, masyarakat dikenakan tarif penyeberangan," katanya.

Untuk mematangkan perencanaan pembangunan, koordinasi dengan pemerintah pusat juga masih berlangsung. Sementara pemrakarsa pembangunan melengkapi persyaratan teknis dan sebagainya.

"Pembahasan pembangunan Jembatan Garuda tidak hanya saat ini saja, tetapi akan ada diskusi lebih lanjut untuk mematangkan perencanaan, melengkapi dan



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

10 / 05 / 2023

Sumber: tribunnews.com

menyempurnakan pembangunan," kata Edi.

Jembatan Garuda ini mencerminkan kemajuan Kota Pontianak yang modern dengan desain yang spektakuler.

Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya bisa mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di kedua wilayah, apalagi pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I juga tengah dibangun,

sehingga kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai.

"Dampak ekonominya sangat besar karena sirkulasi transportasi dan mobilitas lebih lancar dan cepat. Selain itu pula akan menjadi landmark dan objek wisata," pungkasnya.

<https://pontianak.tribunnews.com/2023/05/10/rencana-pembangunan-jembatan-garuda-terus-berlanjut-masih-tahap-penggodokan-dan-gunakan-sistem-kpbu>